

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teori Stewardship

Setiap manusia menyadari bahwa teori stewardship pada intinya mampu ditegakkan dengan integritas, kejujuran, dan keadilan yang utuh. Menurut teori ini, *steward* (pemerintah desa) adalah seseorang atau badan yang paling siap untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan dan bertindak demi kepentingan terbaik masyarakat. Menurut teori ini, yang didasarkan pada asumsi bahwa mereka yang diberi wewenang memiliki kepercayaan dari suatu lembaga, yang dimana posisi aparatur desa dalam organisasi pemerintahan dianggap sebagai memberikan pelayanan yang baik dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka dengan penuh tanggungjawab yang diberikan oleh masyarakat umum.

Donaldson dan Davis mendefinisikan *stewardship theory* dalam artikelnya “*Toward a Stewardship Theory of Management*” sebagai suatu sistem dimana pemerintah lebih terdorong untuk menyediakan kebutuhan pemerintahan desa secara umum. Teori kepengurusan menunjukkan hubungan antara kemajuan pemerintah daerah dan masyarakatnya. Keberhasilan suatu pemerintahan menunjukkan pentingnya memaksimalkan fungsi aparat desa dengan sebaiknya mungkin.<sup>1</sup>

Selain itu, *steward* akan menempatkan nilai yang lebih besar pada kredibilitas dan kepercayaan kepada masyarakat daripada kepentingan pribadi. Prinsipnya adalah bahwa pemerintah desa sepenuhnya berdedikasi untuk memenuhi kebutuhan warganya dan tidak didorong oleh keinginan untuk memajukan urusannya sendiri. Sebaliknya, dengan memenuhi kebutuhan penduduk setempat, para aparat

---

<sup>1</sup> James H. Davis, F. David Schoorman, and Lex Donaldson, “Toward a Stewardship Theory of Management,” *Academy of Management Review* 22, no. 1 (1997): 20–47.

desa yakin bahwa integritas mereka dapat dipertahankan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat publik.<sup>2</sup>

*Steward* adalah seseorang yang bertindak untuk kepentingan orang lain daripada mencari keuntungan pribadi. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran sebagai pihak yang menitipkan amanah dan peran pihak yang memantau dan mengawasi pemerintah desa dalam menjalankan kepemimpinan. Agar pemerintahan yang baik dapat terbentuk, pemerintah juga harus memanfaatkan pelayanan tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Untuk mencapai tujuan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang seefisien dan seefektif mungkin, peneliti memilih fokus pada *steward theory* karena peran *steward* sebagai lembaga pemerintah yang dapat dipercaya untuk menjalankan tugasnya. Tugas dan fungsinya dalam pemerintahan desa secara baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan itu, pemerintah wajib menyediakan laporan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak yang pengguna informasi keuangan pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan kewajibannya tersebut, maka pemerintahan desa melakukan penelitian internal untuk mendapatkan informasi yang berkualitas mengenai kualitas informasi laporan keuangan desa. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka *teori steward* berkaitan dengan penelitian yang sedang di amati yang berjudul yaitu pengaruh transparansi, akuntabilitas dan reponsibilitas terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa, berkisanambungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi teori secara tepat dan efisien dalam penggunaan sumber daya manusia untuk menciptakan pertanggungjawab yang dimaksudkan untuk dilaksanakan selama pelaksanaan kewajiban. Dengan melaksanakan Tanggung jawab tersebut maka *Steward* dapat mengarahkan dan menerapkan kan kepimpinannya sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam

---

<sup>2</sup> Ceacilia Srimindarti Alfasadun, Pancawati Hardiningsih, Sri Devi Ratnasari, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, 2017.

<sup>3</sup> Raharjo,E,. “TEORI AGENSI DAN TEORI STEWARSHIP DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI,” *The Management of Intellectual Property*, 2006, 40–65

pekerjaan instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan desa yang diberikan kepada publik.

## 2. Good Governance

Definisi Mardiasmo tentang tata pemerintahan yang baik menekankan bagaimana pemerintah menangani sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, berbeda dengan Bank Dunia dan UNDP, yang lebih fokus pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam menjalankan negara. Seorang pemimpin politik yang efektif adalah orang yang mahir membuat rencana tindakan. Sedangkan konsep *good governance* adalah tatanan dan kebijakan yang sehat yang ditujukan untuk pertumbuhan sektor publik, seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo.<sup>4</sup>

Menurut buku Mardiasmo, UNDP menyediakan ciri-ciri *Good Governance*. Beberapa ciri yang menentukan tata kelola yang efektif adalah sebagai berikut:

1. *Participation*  
Masukan dari anggota masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa pemikiran dan aspirasinya, dengan tujuan untuk perbaikan pengambilan keputusan.
2. *Rule of law*  
Kerangka hukum yang adil tanpa membedakan status, ras, agama dan deskriminasi lainnya.
3. *Transparency*  
Landasan transparansi adalah aliran informasi yang bebas. Informasi berbasis komunitas, terkini, mendalam, dan akurat tersedia bagi mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*  
Pemerintah desa perlu bertindak cepat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan warganya.
5. *Consensus Orientation*  
Memperhatikan kesejahteraan seluruh masyarakat.
6. *Equity*  
Setiap wilayah diberikan kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan dan pemerataan.

---

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sekto Publik*.

7. *Efficiency and Effectiveness*  
Pengelolaan dana publik yang efektif dan efisien dipastikan.
8. *Accountability*  
Kepemimpinan harus bertanggung jawab kepada orang-orang yang mereka layani atas segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rencana.
9. *Strategic Vision*  
Kepemimpinan bangsa dan masyarakat kita harus dipandu oleh komitmen untuk memperbaiki masa depan.<sup>5</sup>

Dari uraian di atas, seharusnya jelas bahwa suatu organisasi pembangunan yang berpegang pada prinsip demokrasi yang efisien dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang ada, itulah yang dimaksud dengan istilah *Good Governance* ini agar korupsi politik dan administrasi dapat dihindari, disiplin anggaran dapat ditegakkan, dan kerangka hukum dan politik dapat dibentuk untuk mendorong pertumbuhan dan kebaikan publik. Di mana pada pelaksanaan *good governance* harus melaksanakan prinsip-prinsip yaitu salah satunya *Transparansi*, akuntabilitas, *responsibilitas* agar tujuan dan capaian fungsi pemerintah yang baik bisa terwujud dan tercapai dengan tepat dan sempurna.

### 3. **Transparansi**

#### a. **Pengertian Transparansi**

Menurut definisi Deddi dan Ayuningtyas dalam bukunya, *transparansi* berarti memberikan akses kepada publik atas informasi keuangan yang akurat dan terkini secara tepat waktu, dengan pengertian bahwa warga negara memiliki hak untuk mengetahui bagaimana penanganan pemerintahnya, anggaran yang telah diberikan untuk dibelanjakan dan apakah ia mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup> Masyarakat harus memiliki akses terhadap layanan *transparansi* yang mudah

---

<sup>5</sup> Mardiasmo.

<sup>6</sup> Ayuningtyas Deddi, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Selemba Empat, 2010),24.

digunakan, komprehensif, dan mudah dipahami.<sup>7</sup> Menurut Mardiasmo, transparansi didefinisikan sebagai berikut. Bersikap transparan berarti memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki akses terhadap informasi tentang bagaimana sumber daya publik dikelola oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Transparansi dilaksanakan atas dasar kebebasan arus informasi. Proses dari pengumpulan informasi yang di samapaikan atau dilaporkan kepada pemerintah secara langsung maupun tidak langsung dapat diterima oleh masyarakat. Pihak yang berwenang atau yang bertanggung jawab harus memahami dengan dan mengawasi data laporan keuangan desa.<sup>9</sup> Transparansi harus selalu menjadi tujuan utama dari setiap laporan keuangan. Salah satu prinsip kepemimpinan yang bertanggung jawab adalah beroperasi kinerja dengan terbuka. Semua proses informasi pemerintah harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan agar transparan, dan harus ada informasi yang cukup agar proses tersebut dapat dipahami dan dipantau. Oleh karena itu dapat di Tarik kesimpulan bahawa Transparansi adalah keterbukaan informasi terhadap seseorang yang berhak untuk di berikan informasi terkait informasi laporan keuangan desa secara jelas, ringkas dan terbaru.

Sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 58.<sup>10</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاذْكُرُوا أَنَّهُ لَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ إِنَّا لَنَكْتُبُ لَكُمْ فِيهَا حِكْمًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik baiknya yang

<sup>7</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi keti (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).

<sup>8</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sekto Publik*.

<sup>9</sup> Solekhah, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Malang: Setara Press, 2012).

<sup>10</sup> *Al Quran Surat An Nisa Ayat 58 Alquran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen RI ,Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran).

*membri pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sebagai orang muslim kita wajib dalam menyampaikan amanat atau memberikan informasi yang benar, jujur dan sesuai hukum kepada orang-orang yang mempunyai hak atas informasi tersebut. Transparansi dapat meningkatkan tanggung jawab dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap pemimpin, terutama di tingkat desa. Hal ini penting karena tujuan transparansi adalah untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, serta mendorong perlindungan dan menghindari perilaku seperti korupsi dan kecurangan.<sup>11</sup>

#### **b. Indikator Transparansi**

Adapun Indikator transparansi antara lain :

- a) *Informativeness* (Informatif)  
Masyarakat desa yang membutuhkan informasi yang jelas dan akurat diberikan, berikut berita terkini, penjelasan mekanisme, tata cara pengelolaan keuangan, dan fakta kepada pemerintah desa.
- b) *Openess* (Keterbukaan)  
Setiap orang memiliki hak yang sama terkait menerima informasi dengan akses yang mudah untuk data yang bersifat umum. Dan menegaskan untuk informasi yang bersifat umum dan di tujukkan untuk masyarakat public, maka informasi tersebut harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi publik.
- c) *Disclouser* (Pengungkapan)  
Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan aktivitasnya terkait hasil kinerjanya terutama pada informasi laporan keuangan desa. Ada perbedaan antara pengungkapan wajib dan opsional. Pengungkapan opsional sendiri merupakan

---

<sup>11</sup> Bevaola Kusumasari, *Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2015),19.

pengungkapan informasi, diluar dari peraturan standar akuntansi dan badan pengawas.<sup>12</sup>

#### 4. Akuntabilitas

##### a. Pengertian Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas publik menurut Mahmudi yaitu mengandung arti mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan informasi laporan keuangan desa. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban secara publik, perangkat desa harus memberi tahu pihak yang mempercayakan kewenangan kepada mereka dengan menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua informasi dan data yang relevan.<sup>13</sup> “Untuk akuntabilitas publik, pihak pemberi kepercayaan harus menyajikan dan mengungkapkan semua aktivitas - aktivitas yang dilakukan kepada pemberi tanggungjawab,” tulis Mardiasmo dalam bukunya.<sup>14</sup>

Menurut Arifin Sabeni dan Imam Ghozali dalam bukunya mengatakan definisi Akuntabilitas adalah suatu cara seseorang pimpinan yang dituntut untuk meneguhkan bahwa tugas dan kewajiban yang sudah diamanahkan dan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>15</sup> Akuntabilitas dapat diamati melalui pelaporan laporan keuangan yang informatif terbuka, dan tepat waktu, yang pelaksanaannya dengan memberikan pertanggungjawaban, dan mengungkapkan dalam aktivitas apa pun dan memberikan informasi dari semua aktivitas tersebut kepada mereka yang memiliki wewenang dan kebijakan.<sup>16</sup>

Pada QS. An Nahl ayat 91<sup>17</sup> menjelaskan prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab,

<sup>12</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

<sup>13</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2013).

<sup>14</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

<sup>15</sup> arifin dan Imam ghozali Sabeni, *Pokok - Pokok Akuntansi Pemerintahan*, Edisi Empat (Yogyakarta: Edisi Empat : BPFE, 2001).

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

<sup>17</sup> *Al Quran Surat An Nahl Ayat 91 Alquran Dan Terjemahannya*.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ  
 جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ

Artinya “Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Dari arti diatas bahwa sebagai orang muslim, manusia harus menjaga kepercayaan yang di berikan amanah kepada seseorang sebagai contohnya apabila membuat janji maka harus menepatinya, dengan ini akan mencapai kesepakatan dari masalah sosial mapun masalah lainnya, dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak menyalahgunakannya. Tentu saja, hal itu akan menimbulkan sikap kepercayaan dan bertanggung jawab di antara sesama dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan uraian pada ayat di atas yang menyatakan bahwa manusia wajib menjaga kesinambungan antara manusia dengan Allah SWT.

#### **b. Indikator Akuntabilitas**

Adapun indikator dari akuntabilitas antara lain :

- a) Untuk mencegah pelanggaran di kantor dan memastikan kepatuhan hukum, akuntabilitas yang jujur dan legal sangat penting.
- b) Akuntabilitas untuk langkah-langkah atau proses yang terlibat dalam menyelesaikan pekerjaan dikenal sebagai proses akuntabilitas.
- c) Akuntabilitas dalam desain program yang mempertimbangkan pendekatan alternatif yang mencapai tujuan yang sama dengan biaya lebih rendah
- d) Baik pemerintah federal maupun negara bagian harus bertanggung jawab kepada DPR/DPRD dan publik atas tindakan yang didorong oleh kebijakan masing-masing.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sekto Publik*.

## 5. Responsibilitas

### a. Pengertian Responsibilitas

Tanggung jawab (*responsibility*) didefinisikan sebagai keharusan seseorang yang amanahi tugas atau kewajiban yang harus selesaikan seseorang tersebut agar tidak terlalu terjerumus dalam kewajibannya sebab ada akibat dan hukuman yang harus dia hadapi jika gagal memenuhi tanggung jawabnya seperti yang telah ditetapkan.<sup>19</sup> Menurut Agus Dwiyanto, responsibilitas menjelaskan apakah pemerintah desa menjalankannya sesuai dengan prinsip administrasi yang sehat atau sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menyeluruh.<sup>20</sup>

Responsibilitas, sebagaimana didefinisikan oleh Azheri dalam bukunya, adalah segala sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, yang mencakup baik keputusan maupun kebijakan. Menerapkan persyaratan hukum dengan pertanggungjawaban, termasuk kewajiban untuk menebus kerugian yang ditimbulkan. Menurut Salam dalam Azheri menyatakan bahwa Responsibilitas yaitu “tanggung jawab yang bersifat sebagai bebas, mampu menentukan tindakan seseorang dengan pertimbangan sanksi atau konsekuensi.” Dimana dari pengertian diatas dicatat dua hal yaitu

1. Diperlukan kemampuan untuk memilih tindakan.
2. Jika ada potensi kerugian dari suatu tindakan, maka harus ada pertanggungjawaban.<sup>21</sup>

Pentingnya prinsip reponsibilitas yang didasarkan pada tidak melakukan sesuatu yang akan merugikan masyarakat desa dan mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku, telah ditekankan. Dengan tidak menyalahgunakan jabatan seseorang dan dengan berperilaku sesuai dengan profesinya, prinsip ini dapat dipraktikkan dengan

---

<sup>19</sup> D. U. Rani, *Peran Guru Bk Dalam Mengembangkan Responsibilitas Siswa Melalui Layanan Konseling Individu Di Man Pematang Bandar Kabupaten Simalungun* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

<sup>20</sup> Agus Dwiyanto, *Dwiyanto, Agus.. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: UGM Press, 2006), 57.

<sup>21</sup> Busyara. Azheri, “*Corporate Social Responsibility*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 86.

kesadaran individu maupun badan. Sesuai dengan QS. Al Anfal ayat 27,<sup>22</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*

Berdasarkan uraian di atas, maka tanggung jawab memberikan pengaturan yang tepat untuk memantau apakah peralatan pemerintah yang relevan menjalankan otoritas yang diberikan sesuai dengan prosedur dan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Kebijakan publik diartikan bertanggung jawab jika individu melaksanakan tugas seefektif dan seefisien mungkin, terlepas dari apakah mereka dibayar atau tidak, dan dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia.

#### **b. Indikator Tanggung Jawab**

Adapun Indikator tanggung jawab adalah antara lain:

##### 1) Daya Tanggap

Kemampuan untuk menanggapi karyawan dengan cara yang tepat waktu, akurat, dan efisien adalah contoh pertanggungjawaban yang baik. Contoh lain dari pertanggungjawaban termasuk kewaspadaan, kecepatan karyawan yang menangani setiap masalah, dan kewaspadaan.

##### 2) Produktif

Agar produktif, penting untuk mengetahui cara terbaik mengatur dan menggunakan sumber daya manusia. Hasil dari pekerjaan dan peluang untuk meningkatkan kualitas kerja adalah tujuan produktivitas.

##### 3) Ketetapan Waktu

Ketetapan waktu merupakan jangka waktu untuk menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Persyaratan waktu untuk berbagai fungsi pemerintah diatur oleh norma-norma yang ditetapkan.

---

<sup>22</sup> Al Quran Surat Al Anfal Ayat 27 Alquran Dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, n.d.).

#### 4) Disiplin Kerja

Aparat desa harus disiplin tempat kerja ketika mereka tidak mematuhi atau mengabaikan aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh peranturan perundang undangan, maka pemerintah desa harus menerima hukuman atau konsekuensi dari peraturan yang berlaku.<sup>23</sup>

### 6. Kualitas informasi Laporan Keuangan Desa.

#### a. Pengertian Informasi Laporan Keuangan

Transaksi keuangan pemerintah desa dicatat secara rinci dalam laporan keuangan untuk periode waktu tertentu. Efisiensi pemerintah dapat diukur melalui laporan keuangan desa. Laporan keuangan adalah catatan transaksi keuangan yang disusun menurut posisi berbagai pihak yang terlibat. Seperti transaksi – transaksi aktivitas mengenai keuangan yang ada di pemerintahan. Selain itu berfungsi sebagai data keuangan, yang dibentuk dalam sebagai pelaporan informasi laporan keuangan..<sup>24</sup> masyarakat biasanya menerima informasi keuangan dari pemerintah melalui laporan keuangan. karena tingginya volume informasi dan potensi konflik kepentingan antara pemerintah dan pengguna informasi keuangan maka dengan hasil audit dan pengawas atas laporan keuangan oleh pihak yang berkepentingan diharapkan dapat meningkat kualitas informasi keuangan yang dilaporkan pemerintah. Sehingga pemerintah daerah dan warga negara dapat memperoleh manfaat dari transparansi keuangan. Jika laporan keuangan akan digunakan oleh pemerintah desa dalam membuat keputusan penting, mereka harus berkualitas tinggi dan memberikan informasi yang berharga.<sup>25</sup>

Menurut Nordiawan dalam bukunya Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan desa berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban atas pengelolaan

---

<sup>23</sup> Dwiyanto, *Dwiyanto, Agus.. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.*

<sup>24</sup> Paul Lillrank, “The Quality of Information,” *Internasional Journal of Quality & Reliability Management* Vol. 20 No (2013): 691–703.

<sup>25</sup> Maulana et al., “Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan 1.”

keuangan negara atau daerah selama periode waktu tertentu. Kebijakan pemerintah daerah dan laporan keuangan daerah didasarkan pada penganggaran pendapatan daerah. Untuk dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau digunakan sebagai pedoman untuk tahun yang akan datang, laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, laporan keuangan adalah laporan yang disusun atas keadaan keuangan dan transaksi pelapor pemerintah.<sup>26</sup>

Laporan keuangan harus diakhiri berdasarkan pengakuan yang sah saat ini dan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.<sup>27</sup>(empat) Kualitas berikut merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi untuk kualitas keuangan pemerintah untuk memenuhi standar yang ditetapkan: relevansi, keandalan, perbandingan, dan pemahaman. Hal ini juga tertuang dalam Al Qur'an Surat Al Muthaffifin, ayat 1 sampai 3.<sup>28</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (۱) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (۲) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (۳)

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”

Pada firman Allah dijelaskan pada ayat ini Dosa kecurangan diletakkan dalam Akuntansi Syariah adalah mereka yang curang dalam proses pengukuran dan

---

<sup>26</sup> Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. Nordiawan, Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik FE UGM. Deddi, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, ed. Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik FE UGM., Edisi Pertama (Yogyakarta: Edisi Pertama, 2012).

<sup>27</sup> A. H. Tanjung, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual : Pendekatan Teknis Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010* (Bandung: Alfabeta, 2012).

<sup>28</sup> *Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 282 Alquran Dan Terjemahnya*.

penimbangan. Perlu ada keakuratan, transparansi, dan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan.

Otoritas daerah dapat menggunakan informasi tentang laporan keuangan OPD untuk membandingkan pendapatan dan pengeluaran aktual dengan yang disepakati, yang dapat membantu mereka lebih memahami kewajiban mereka berdasarkan ketentuan hukum saat ini untuk jenis transaksi tertentu. Pengguna dapat menggunakan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan OPD untuk mengevaluasi akuntabilitas dan membentuk penilaian politik, sosial, dan ekonomi.

Laporan keuangan pemerintah berkualitas tinggi harus mematuhi persyaratan hukum yang berlaku dan mudah dipahami, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Jika semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan dapat memenuhi kriteria yang relevan, maka kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa informasi tersebut Tentang laporan keuangan pemerintah berkualitas baik dan tinggi.<sup>29</sup>

#### **b. Indikator Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Adapun indikator kualitas informasi laporan keuangan desa sebagai berikut:

##### a) Relevan

Jika data yang terkandung dalam laporan keuangan dapat membantu pemerintah mengevaluasi hasil penilaian sebelumnya atau yang sedang berlangsung, maka data tersebut dapat dianggap relevan.

##### b) Andal

Keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan bergantung pada penggunaan dokumentasi yang sesuai sebagai dasar untuk presentasi dan arah mereka. Informasi mungkin berguna, tetapi dapat disalahgunakan dan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan jika tidak dapat dimanfaatkan dengan baik karena kesalahpahaman atau masalah lainnya.

---

<sup>29</sup> Agus Wahyudi and Diah Anggeraini Hasri, "Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 2 (2021): 293–98.

## c) Dapat Dibandingkan

Salah satu cara untuk meningkatkan nilai laporan keuangan adalah dengan membandingkan data yang disajikan di dalamnya dengan yang disajikan dalam laporan lain, baik dari periode waktu yang sama atau dari perspektif yang lebih luas. dimungkinkan untuk membandingkan internal dan eksternal. Jika pemerintah menjaga standar kualitas yang sama dari satu tahun ke tahun berikutnya, maka perbandingan internal akan dimungkinkan. Jika pemerintah dibandingkan dengan kualitas akuntansi yang sebanding, maka perbandingan eksternal dapat dibuat. Periode perubahan ini tergantung pada pemerintah mengikuti pendekatan yang lebih efektif untuk akuntansi daripada apa yang saat ini ada atau di masa lalu

## d) Dapat Dipahami

Informasi laporan keuangan dapat disesuaikan dengan batas kriteria pemahaman pengguna dan diungkapkan dalam bentuk yang mudah dipahami. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pengguna akan terbiasa dengan pelaporan dan kegiatan yang melekat pada administrasi desa.<sup>30</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun sumber informasi yang menjadi bahan acuan bagi penulisan penelitian ini berasal dari penelitian terdahul. ada beberapa yang berkaitan mengenai transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa yang di jadikan sebagai landasan penelitian ini. Berikut adalah penelitian– penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh, Transparansi Pelaporan	Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan	Persamaan pada penelitian	Perbedaan pada penelitian terdahulu

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

	<p>Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.</p> <p>Zefri maulana, Nasrul Kahfi Lubis Tahun 2020.<sup>31</sup></p>	<p>bahwa keterbukaan yang lebih besar dalam pelaporan keuangan berdampak positif pada kualitas laporan.</p>	<p>terdahulu adalah sama sama meneliti variabel Transparansi</p>	<p>adalah penelitian saat ini menambahkan variabel akuntabilitas, responsibilitas dan letak perbedaan pada penelitian terdahulu pada variabel dependen.</p>
2.	<p>Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa Dan Transparasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan.</p> <p>Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Melia , Imam Agus</p>	<p>Hasil penelitian menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, dan penghargaan terhadap peran kepala desa. tentang keakuratan laporan APBDes Kabupaten Pamekasan tahun 2020.</p>	<p>Kualitas informasi dalam laporan keuangan desa merupakan variabel dependen dalam persamaan tersebut, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi merupakan variabel independen.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian terdahulu adalah menghilangkan variabel pengetahuan kepala desa yang kemudian pada penelitian ini menggunakan variabel Responsibilitas.</p>

<sup>31</sup> Maulana et al., “Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan 1.”

	Faisol Tahun 2020. <sup>32</sup>			
3.	<p>Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Bandung Tulungagung.</p> <p>Dwi Wulan Fitriani, dan Dyah Pravitasari Tahun 2022.<sup>33</sup></p>	<p>Hasil kesimpulannya partisipasi masyarakat terhadap pemerintah desa Bandung Tulungagung pada tahun 2022 meningkat secara signifikan adanya transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah desa tulungagung.</p>	<p>Persamaan pada penelitian terdahulu adalah sama sama menggunakan variabel independen transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah desa tulungagung.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang.</p>
4.	<p>Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fairness Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pemanfaatan</p>	<p>Menurut temuannya, kinerja lembaga pemerintah meningkat ketika lebih banyak informasi dipublikasikan, dan ketika karyawan dimintai pertanggungjawaban</p>	<p>Persamaan pada penelitian terdahulu adalah variabel yang sama yaitu akuntabilitas.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah menghilangkan variabel fairness dan perbedaan pada variabel</p>

<sup>32</sup> Tahir, Malia, and Faisol, "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan."

<sup>33</sup> Dwi Wulan Fitriani, "Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Bandung Tulungagung."

	Accounting Information System Sebagai Pemoderasi  Wahyuni Arifin, Saiful Muchlis, Suhartono Tahun 2020. <sup>34</sup>	atas tindakan mereka. Namun, sistem akuntansi tidak sepenuhnya memanfaatkan keadilan dalam meningkatkan kinerja lembaga.		dependen yaitu faktor Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pemanfaatan Accounting Information System Sebagai Pemoderasi
5.	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.  Ridwan Indra Hermawan, Yulita Zanaria,	Efisiensi penyaluran ternyata dipengaruhi secara positif oleh variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Kota Gajah Provinsi Lampung Tahun 2020.	Letak persamaan pada penelitian terdahulu adalah sama sama menggunakan variabel akuntabilitas, Transparansi.	Letak perbedaan pada penelitian terdahulu adalah menghilangkan variabel partisipasi dan perbedaan pada variabel dependen Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

<sup>34</sup> Ambarwati Ambarwati, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pemanfaatan Accounting Information System Sebagai Pemoderasi," *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK* 6, no. 3 (2021): 88–96, <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v6i3.128>.

Nedi Hendri Tahun 2021 <sup>35</sup>			
---	--	--	--

Seperti terlihat pada tabel perbandingan di atas, penelitian ini dilatarbelakangi oleh karya Sofiyah Yatimah Tahir Evi Melia Imam Agus Faisol dan memiliki kesamaan dengannya.<sup>36</sup> Persamaan dengan penelitian terdahulu sama sama menggunakan variabel transparansi dan akuntabilitas dan letak perbedaan pada penelitian terdahulu peneliti menggunakan satu variabel yang berbeda dengan menambah variabel yaitu responsibilitas, dan perbedaan terletak pada faktor faktor yang mempengaruhi serta objek yang berbeda yaitu di pemerintahan desa di desa Undaan Lor kecamatan undaan kabupaten kudus.

### C. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini akan dianalisis hubungan antara variabel bebas (Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas) dengan variabel terikat (Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus) untuk mengetahui variabel yang memiliki pengaruh paling besar.

Sugiyono berpendapat bahwa seseorang dapat menggambarkan suatu sistem dengan terlebih dahulu menafsirkan struktur penalaran sebagai model teoritis tentang bagaimana hipotesis mengidentifikasi dengan berbagai variabel yang telah didefinisikan sebagai signifikan.<sup>37</sup>

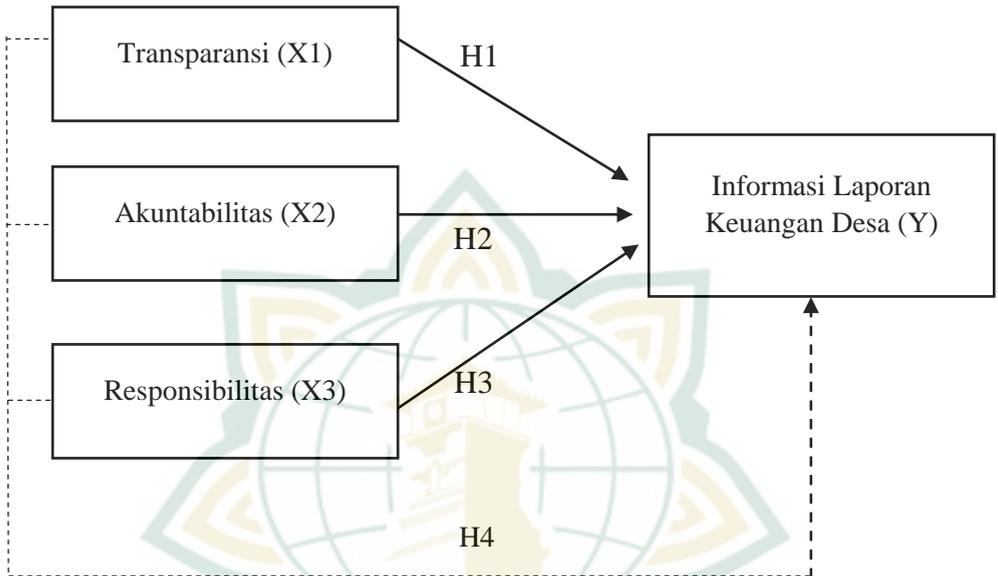
---

<sup>35</sup> Ridwan Indra Hermawan, Yulita Zanaria, Nedi Hendri, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah*, Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 2, No. 2, Oktober (2021)

<sup>36</sup> Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Melia, Imam Agus Faisol, *Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan*, Journal Of Accounting And Financial Issue Vol.1, Nomor, 1, Mei (2020).

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: alfabeta (2017), 283.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**



(Sumber : Diolah peneliti, 2022)

—————> : Parsial  
 - - - - -> : Simultan

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis penelitian memberikan alasan untuk mengumpulkan data dan metode untuk menjelaskan jalan yang harus diambil dalam menguji penjelasan untuk suatu masalah. Untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen.<sup>38</sup>

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsibilitas Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan kabupaten Kudus”, Hipotesisnya adalah sebagai berikut :

**Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Desa**

<sup>38</sup> Vivi candra et al., *Pengantar Metodologi Penelitian* (medan : Yayasan kita menulis 2021).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang kegiatan keuangan yang berkaitan dengan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat luas. Prinsip keterbukaan menuntut setiap orang memiliki akses terhadap informasi tentang program program pemerintah, khususnya informasi tentang tujuan, metode, dan hasil kebijakan program tersebut.<sup>39</sup>

Penelitian yang dilakukan Yulia Fransiska Br Bangun, yang menilit tentang transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan.<sup>40</sup> menunjukkan terdapat tentang transparansi, terhadap pengelolaan keuangan desa, karena sebagai pemerintah desa pelaporan merealisasi prinsip transparansi diantaranya telah melaksanakan standar pelaporan sesuai mekanisme keterbukaan terhadap kepatuhan standar pelaporan. Tak hanya itu pada hasil penelietian yang dilakukan oleh Peneletian sama yang dilakukan oleh Zefri Maulana, Nasrul Kahfi Lubis<sup>41</sup> yang berjudul Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Yang menunjukkan bahwa, Transparansi pelaporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.<sup>42</sup> dari penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa.**

### **Pengaruh Akuntanbilitas Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Desa**

Akuntabilitas keuangan desa adalah suatu pertanggungjawaban tentang hasil pengungkapan dan ketaatan berkenaan dengan peraturan yang berlaku yang mengatur transaksi yang sedang berlaku. Pertanggungjawaban adalah keterbukaan informasi keuangan dan aturan yang mengatur transaksi yang

---

<sup>39</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2009), 30.

<sup>40</sup> Yulia Fransiska Br Bangun, *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitasterhadap Pengelolaan Keuangan Desa Namogajah, Jurnal Neraca*, 2021.

<sup>41</sup> Maulana et al., “Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan 1.”

<sup>42</sup> Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transpansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Sosiologi*, 01, 18.

terkait yang masuk keluarnya dana keuangan desa misal pembayaran serta transfer anggaran desa oleh Instansi Pemerintah Desa. Transparansi didirikan sebagai inti dari perbuatan yang menyediakan informasi yang mereka butuhkan kepada publik. Dengan demikian, mereka yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum bisa memperoleh informasi dengan aman. Transparansi menegaskan bahwa karena kegiatan pemerintah ditujukan untuk memajukan kepentingan rakyat, maka setiap tahun periode informasi tentang pelaporan keuangan tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hery Harjono Muljo, Heny Kurniawati<sup>43</sup> yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Menurut temuan, terdapat korelasi positif antara akuntabilitas dan pengelolaan anggaran, korelasi positif antara akuntabilitas dan transparansi, dan korelasi positif antara akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama. Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah, dan Diandra Pepi Vabiani juga menemukan hasil serupa dalam penelitian mereka sendiri<sup>44</sup> yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas di SKPD Kabupaten Bandung Barat sudah baik, hasil pengujian variabel menunjukkan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H2 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa.**

---

<sup>43</sup> Hery Harjono Muljo and Heny Kurniawati, "TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN HERY HARJONO MULJO ; HENY KURNIAWATI ; PAHALA," *Binus Business* 5, no. 9 (2014): 537–50.

<sup>44</sup> Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah, and Diandra Pepi Vabiani, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 10, no. 1 (2019): 51–62.

## **Pengaruh Responsibilitas Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Desa**

Responsibilitas merupakan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memahami syarat-syarat pertanggungjawaban pemerintah dalam amanah dan tanggungjawab yang diterima dan diharapkan untuk diikuti dan tidak menyeleweng sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, masrakat mempunyai hak mengetahui atas tanggung jawab tentang penyediaan informasi tentang program dan inisiatif yang dimuat dalam Laporan keuangan desa.<sup>45</sup>

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Independensi terhadap Kinerja Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia merupakan judul penelitian Nasrulloh. Menurut temuan penelitian ini, kinerja perusahaan mendapat manfaat yang sama dari peningkatan keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kemandirian.<sup>46</sup> Dan peneletian dengan hasil yang sama juga dilakukan oleh Penelitian Idrus Stambul, Ahmad Anto, Nus Syamsu, Hamzah<sup>47</sup> yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja dengan penelitian ini menemukan bahwa terdapat efek sinergis antara transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab terhadap efektivitas guru. Efektivitas guru tidak dipengaruhi oleh keterbukaan, akuntabilitas, atau tanggung jawab yang meningkat untuk mengelola dana sekolah, setidaknya tidak seluruhnya.

Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H3 : Responsibilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa.**

---

<sup>45</sup> Ade Rasinta , “*Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang*” 43

<sup>46</sup> Nasrulloh, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas Dan Independensi Terhadap Kinerja Bagi Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Indonesia,” 2016, 78–85.

<sup>47</sup> Hamzah Idrus Stambul, Ahmad Anto, Nus Syamsu, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru,” *Dinamika Pendidikan Unnes* 9, no. 2 (2014): 100–114.

## **Pengaruh Antara Transparansi, Akuntabilitas dan Responsibilitas Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Desa**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan variabel yang mewakili transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap, yang masing-masing mewakili salah satu dari tiga prinsip tata kelola yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Akuntabilitas merupakan tentang penyediaan informasi tentang kegiatan dan hasil kinerja pemerintah kepada pemerintahan desa terkait pengelolaan laporan keuangan desa atau dikenal sebagai pengumuman publik. Transparansi adalah pengungkapan oleh aparatur desa tentang kegiatan, program, dan hasil yang telah dilakukan dan akan dilakukan dengan penggunaan anggaran desa baik secara tunai maupun kredit dalam keseharian yang digunakan oleh pemerintah. Responsibilitas adalah syarat agar pemerintah memahami kebutuhan dan kekurangan rakyatnya, yang kemudian pemerintah desa mempelajari sehingga menciptakan kebijakan yang strategis diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan prinsip peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dari penelitian Berdasarkan hasil oleh penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wulan Fitriani<sup>48</sup> yang berjudul Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Bandung Tulungagung menunjukkan bahwa Transparansi laporan keuangan, akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung. Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Moderator Dampak Akuntabilitas, Transparansi, dan Kewajaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah oleh Wahyuni Arifin, Saiful Muchlis, dan Suhartono<sup>49</sup> dengan penelitian menunjukkan bahwa instansi pemerintah berkinerja lebih baik ketika mereka dimintai pertanggungjawaban, transparan, dan adil. Selain akuntabilitas dan transparansi, analisis variabel moderasi mengungkapkan bahwa

---

<sup>48</sup> Dwi Wulan Fitriani, "Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Bandung Tulungagung."

<sup>49</sup> Ambarwati Ambarwati, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pemanfaatan Accounting Information System Sebagai Pemoderasi," *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK* 6, no. 3 (2021): 88–96,

penggunaan sistem akuntansi memoderasi dampak keadilan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H4 : Pengaruh antara Transparansi, Akuntabilitas dan Responsibilitas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi keuangan desa.**

